

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja pembangunan ekonomi Indonesia bisa dikatakan sangat membanggakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir ini sangatlah tinggi, walaupun mengalami penurunan di masa krisis. Tetapi tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan diantaranya kemiskinan dan rendahnya pembangunan manusia. Menurut BPS angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 39,5 juta lebih tinggi daripada angka kemiskinan tahun 2005 yang mencapai 35,1 juta. Bisa dipastikan jumlah penduduk miskin yang besar tersebut adalah umat Islam, mengingat Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Dengan demikian masalah kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi umat Islam saat ini.

Dalam Islam kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius. Jika kemiskinan merajarela maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan kemanusiannya). Ia bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan *mathgiyyan* (mampu membuat seseorang zalim kepada Allah maupun manusia lainnya). Dalam hal ini Rasulullah sendiri pernah ber-*tawwudz* (memohon lindungan Allah) dari kemiskinan. Artinya, apabila kemiskinan itu tidak berbahaya, maka Rasulullah tidak perlu bertaawudzi atasnya, mengingat kemiskinan akan mendekatkan seseorang kepada kekufuran.

Di samping dihadapkan pada angka kemiskinan yang cukup tinggi, Indonesia juga dihadapkan pada masalah lainnya yang sangat serius, yaitu masih rendahnya pembangunan manusia. Rendahnya pembangunan manusia tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Dalam Indeks yang dikeluarkan terakhir oleh UNDP

posisi Indonesia berada 107 dari 177 negara di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada pada kisaran negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pembangunan manusia level menengah. Posisi ini tetap bertahan sejak UNDP mengeluarkan HDI pada tahun 1990 hingga tahun terakhir 2005. Jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti halnya Singapura ranking Indonesia jauh di bawah Singapura, begitu juga dengan Malaysia dan Thailand.

Padahal pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Dengan demikian sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas penduduk untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya bisa mengurangi kemiskinan. Dari beberapa hasil penelitian pun menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor publik sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin, seperti penelitian yang telah dilakukan antara lain Fan et. Al (2000), Gomanee at.al (2003), Brata (2005) dan Chemingui (2007).

Kenyataannya seringkali terjadinya *trade off* antara pengeluaran di sektor publik (kesehatan dan pendidikan) dengan pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi (fisik). Hal inilah yang seringkali terjadi dalam manajemen anggaran pemerintah. Menurut Brata (2005), pengeluaran investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, disisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal inilah yang luput dari perhatian selama ini, penyediaan infrastruktur ekonomi untuk investasi swasta kemungkinan besar telah mengorbankan investasi pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang berhasil sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.

Ketika terjadi krisis ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor publik mengalami penurunan. Pengeluaran publik ini sebagai alat ukur (*proxy*) investasi publik. Dari total investasi tahun 1996, investasi sektor publik maupun swasta mencapai angka 27 persen dari PDB, dimana sektor publik hanya mencapai 6,5 persen dari PDB, presentase tersebut menurun tajam pada tahun 2000 menjadi 4 persen, tetapi pada tahun 2005 mulai mengalami peningkatan kembali, sama dengan periode sebelum krisis yaitu 6,5 persen dari PDB (World Bank, 2007). Dengan demikian tingkat investasi publik di Indonesia masih merupakan yang terendah diantara negara-negara berpenghasilan menengah. Selanjutnya World Bank (2007) mengemukakan bahwa Indonesia telah melampaui periode pasca krisis, kini telah memiliki sumberdaya keuangan yang memadai untuk memenuhi kegiatan pembangunan. Kebijakan untuk menekan defisit anggaran, merupakan hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Kini saatnya untuk mengambil langkah-langkah peningkatan sesuai dengan apa yang telah dicapai beberapa tahun belakangan ini serta menggunakan sumber-sumber keuangan negara secara efektif dan efisien untuk memperbaiki layanan pendidikan, perluasan layanan kesehatan, menutup kesenjangan infrastruktur yang sangat penting, semuanya untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun ekonomi yang kompetitif.

## **1. 2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini terkait dengan masalah rendahnya pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan. Pada masa kejayaan Islam terdahulu, instrumen yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah instrumen zakat. Instrumen zakat saat itu merupakan salah satu instrumen sistem keuangan publik yang dikelola negara. Sistem tersebut telah tercatat mampu mensejahterakan umat saat itu. Dalam sistem fiskal saat ini di Indonesia, zakat bukanlah sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk mengatasi persoalan umat Islam terkait dengan rendahnya pembangunan manusia dan tingginya kemiskinan. Dengan terhapusnya zakat dalam sistem keuangan publik tersebut telah membuat umat Islam kehilangan minimal dua hal ( Nasution dkk, 2006: 206) yaitu menghilangnya spirit religiositas (disebabkan pandangan sekularisme) dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat (tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam telah menghilangkan metode mensejahterakan rakyat).

Dengan terhapusnya zakat dalam sistem keuangan publik tersebut, maka saat ini yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan umat Islam hanya tertumpu pada sumber penerimaan negara yang terbatas. Dengan sumber penerimaan yang terbatas tersebut menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai sektor publik pun relatif rendah. Menurut World Bank (2007), tingkat investasi publik di Indonesia masih merupakan yang terendah diantara negara-negara berpenghasilan menengah. Bahkan sejak terjadi krisis ekonomi investasi pada sektor publik ini cenderung menurun. Rendahnya tingkat investasi publik di Indonesia tersebut tercermin dari rendahnya alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor tersebut.

Diantara sektor publik yang krusial bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. Dalam amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 34 Ayat 1 menyebutkan, “ Pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total anggaran. Tetapi sampai saat ini anggaran yang ada belum mencapai angka 20%. Bahkan, dibandingkan dengan negara-negara tetangga terdekat yaitu Malaysia, Thailand, dan Filipina, alokasi pengeluaran di sektor pendidikan di Indonesia masih relatif rendah.

Rendahnya alokasi pengeluaran di sektor pendidikan terjadi juga pada sektor kesehatan. Keteringgalan Indonesia dalam sektor kesehatan tersebut terlihat dari beberapa indikator utama terhadap pencapaian di sektor kesehatan seperti tingkat kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu. Saat ini pengeluaran untuk sektor kesehatan masih di bawah 1 persen dari PDB. Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara keinginan untuk meningkatkan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan, sementara dari sisi alokasi anggaran untuk sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih relatif rendah. Disamping itu permasalahan yang krusial sehubungan dengan pengelolaan keuangan publik terkait dengan sistem nilai. Nilai-nilai Islam yang banyak dianut masyarakat di Indonesia, yang seharusnya diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik justru telah dihilangkan.

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan?
4. Bagaimanakah nilai-nilai Islam mengatasi persoalan umat terkait dengan kemiskinan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pengurangan kemiskinan.
3. Menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
4. Mengkaji nilai-nilai Islam dalam mengatasi persoalan umat terkait kemiskinan.

### 1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran di sektor publik hanya dibatasi di dua sektor yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan manusia dimana pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendapatan tetapi juga akses terhadap yang lainnya dalam hal ini pendidikan dan kesehatan.
- b. Indeks pembangunan manusia merupakan *proxy* dari pembangunan manusia. Dengan indeks tersebut akan digambarkan posisi suatu negara apakah termasuk kategori maju, berkembang atau negara miskin.
- c. Data kemiskinan, data pengeluaran pemerintah didapat dari data yang dikeluarkan oleh BPS, sementara data indeks pembangunan manusia merupakan data yang dikeluarkan atas kerjasama BPS, Bappenas dan UNDP. Data yang diteliti adalah data dalam lingkup antar propinsi dengan data tiga tahunan yaitu tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005.
- d. Kajian Islam dalam mengatasi permasalahan umat terkait dengan masalah kemiskinan akan dikaji berdasarkan studi pustaka.

## 1.6. Kerangka Pemikiran

Permasalahan besar yang dihadapi umat Islam saat ini di Indonesia terkait dengan rendahnya pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan. Salah satu hal yang biasa dilakukan pemerintah saat ini dengan melakukan investasi pada sektor publik. Investasi sektor publik tersebut bisa *diproxy* dari pengeluaran pemerintah. Diantara sektor publik yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan adalah sektor pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan merupakan elemen vital terpenting dalam memberantas kemiskinan. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat upah maupun pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seseorang terhindar dari kondisi miskin (Zuluaga).

Dalam teori *Human Capital*, Schultz (1961) dan Becker (1964) mengemukakan bahwa pendidikan terlihat sebagai investasi sumberdaya saat ini untuk mendapatkan *return* di masa depan. Schultz berargumentasi bahwa pengetahuan dan skill adalah bentuk dari kapital, yang akan menghasilkan “*deliberate invesment*”. Investasi dalam pendidikan formal, *training*, dan kesehatan akan meningkatkan kesempatan dan pilihan bagi individu, yang akan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Seperti halnya dengan pendidikan, kesehatan pun mempunyai keterkaitan dengan kemiskinan. Atmawikarta mengemukakan bahwa adanya hubungan keterkaitan antara kesehatan dengan kemiskinan. Ada berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan pendapatan

Apabila kualitas sumberdaya manusia tersebut rendah yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah maka akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah indeks komposit dari harapan hidup, melek huruf dewasa, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. pada tahun 2005 Indonesia berdasarkan indeks pembangunan manusia tersebut menempati posisi 107 dari 177 negara di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara sedang berkembang dengan tingkat pembangunan manusia level menengah. Jika Indonesia tidak memperhatikan masalah pembangunan manusia ini, bukan tidak mungkin akan menurunkan indeks pembangunan manusia sehingga akhirnya memposisikan Indonesia pada negara miskin atau tingkat pembangunan manusia yang rendah.

Dari paparan di atas terungkap bahwa dengan semakin besarnya alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan semakin luasnya masyarakat untuk mendapat akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Seperti yang terungkap dari pernyataan Amartya Sen (1985), masalah kemiskinan tidak hanya masalah *income* semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif. Pendekatan penanganan kemiskinan yang komprehensif tersebut sebenarnya telah ditawarkan oleh Islam jauh lebih dahulu dari pendekatan yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional akhir-akhir ini. Instrument keuangan publik yang digunakan dalam penangan kemiskinan tersebut adalah zakat. Dalam Islam dikemukakan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya (Qaradhawi, 2005)

- a. Kemiskinan yang disebabkan kelemahan fisik (anak-anak, terlalu tua, penyakit, cacat) sehingga menghalangi untuk memperoleh penghasilan untuk itu berhak memperoleh zakat. Zakat yang diperuntukkan baginya dikarenakan kelemahan fisik dan juga rasa empati atas kekurangan yang ada padanya hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat.



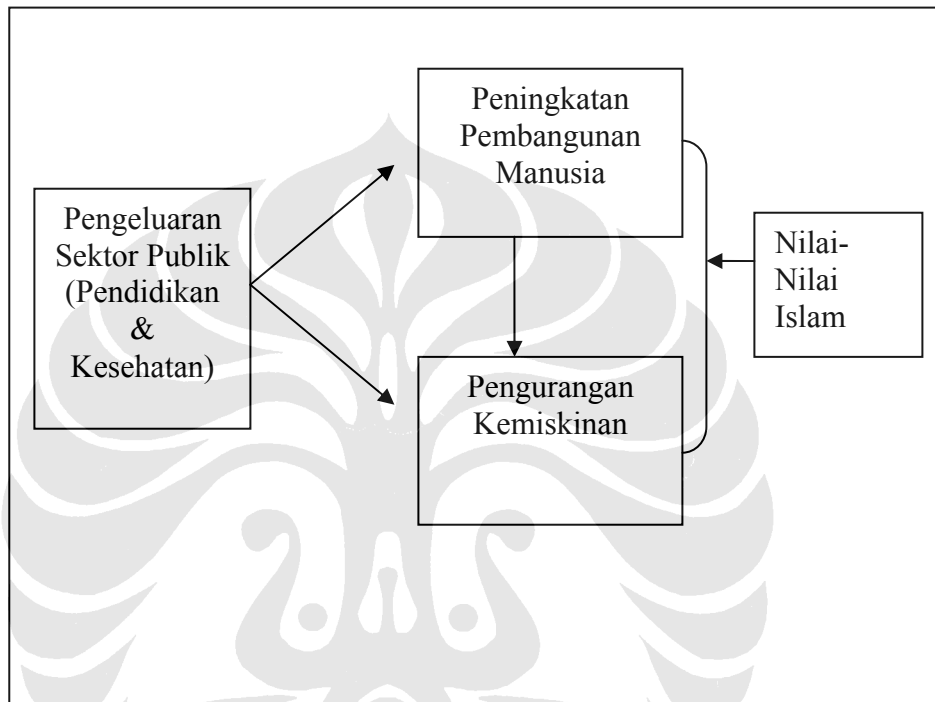
- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, walaupun mereka telah mengusahakan sekuat tenaganya. Solusinya diatasi seperti yang dilakukan dalam menghadapi pengangguran Jabariah. Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Bantuan yang diberikan itu perlu disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan untuk memulai suatu usaha yang produktif, bukan hanya bantuan dalam bentuk uang atau bahan makanan yang cepat habis.

Berdasarkan hal tersebut, penanganan kemiskinan dalam Islam tidak sekedar berbasis *income* saja, yang langsung memberikan fakir miskin sekedar semangkuk biji-bijian atau dirham, sebagaimana yang dikira khalayak umum. Tetapi jauh lebih komprehensif yang disesuaikan dengan akar permasalahan kemiskinan itu sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Para ahli fiqh dalam Qardhawi (2005) menyebutkan pembahasan kebutuhan mendasar kaum muslim antara lain menghilangkan kebodohan dan penyakit pada masa ini. Kebodohan akan membunuh peradaban dan membinasakan kehidupan. Dalam hal ini perlunya menyekolahkan generasi muda ke tingkat yang lebih tinggi serta memberikan kesempatan bagi yang berprestasi untuk bisa memperdalam ilmunya. Sementara itu terkait dengan masalah kesehatan adalah mempermudah dan mempercepat pengobatan dengan tidak membiarkan suatu penyakit menyerang pertahanan tubuh dan membinasakan suatu individu, keluarga, maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka alur pikir penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**  
**Alur Pikir Penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di**  
**Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia**  
**Dan Pengurangan Kemiskinan.**



### 1.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil studi sebelumnya, maka dapat ditarik berbagai hipotesis awal, yaitu:

1. H<sub>0</sub>:  $\beta = 0$ , tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia  
H<sub>1</sub>:  $\beta \neq 0$ , Ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia.
2. H<sub>0</sub>:  $\beta = 0$ , Tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap angka kemiskinan.  
H<sub>1</sub>:  $\beta \neq 0$ , Ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap angka kemiskinan

3.  $H_0: \beta = 0$ , Tidak ada pengaruh pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan  
 $H_1: \beta \neq 0$ , Ada pengaruh pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan

### **1.8. Metode Penelitian**

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan data dan informasi dengan studi literatur. Data sekunder tersebut akan didapat dari hasil pengumpulan-pengumpulan data maupun informasi dari instansi yang terkait ataupun dengan cara *searching* di internet. Kegiatan ini dilakukan supaya penulis mendapat data pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan maupun kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan angka kemiskinan regional (antar propinsi) di Indonesia untuk tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005 dengan data panel. Penggunaan data panel ini dikarenakan keterbatasan dalam data sehingga perlu digabungkan antara data *time series* dan data *cross section*. *Time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (dalam penelitian ini data *time series* tiga tahunan) terhadap satu individu (misal data kemiskinan tiga tahunan). Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu (misal, indeks pembangunan manusia 33 daerah propinsi di Indonesia untuk data tiga tahunan tertentu).

Pengumpulan data tersebut sebagai pelengkap dalam melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan dukungan empiris mengenai pentingnya investasi di sektor publik tersebut.

Kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah alat analisis yang menggunakan model matematik, statistik dan ekonometrika atau model ekonomi lainnya. Penggunaan metode kuantitatif dengan ekonometrika tersebut dilakukan untuk membuat model

regresi dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian. Adapun model regresi tersebut yang selanjutnya akan diestimasi dengan metode tertentu. Metode analisis untuk menjawab permasalahan digunakan model persamaan regresi sederhana dengan data panel sebagai berikut:

$$1. PM_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + U_{it} \quad i=1,2, \dots, N; \quad t=1,2, \dots, T \quad \dots \dots \dots (1.1)$$

$$2. K_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + U_{it} \quad i=1,2, \dots, N; \quad t=1,2, \dots, T \quad \dots \dots \dots (1.2)$$

$$3. K_{it} = \alpha + \beta PM_{it} + U_{it} \quad i=1,2, \dots, N; \quad t=1,2, \dots, T \quad \dots \dots \dots (1.3)$$

Dimana:

$K_{it}$  = kemiskinan t untuk unit *cross section* i

$PSPX_{it}$  = pengeluaran sektor publik t untuk unit *cross section* i

$PMX_{it}$  = pembangunan manusia t untuk unit *cross section* i

$u_{it}$  = *Error*

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Setelah diperoleh model regresi dari data panel tersebut, maka akan dilakukan estimasi dengan metode PLS, efek tetap dan metode efek random. Selanjutnya baru dilakukan pengujian atas model tersebut dengan uji Chow, Hausman dan uji LM. Setelah ditetapkan model yang tepat dengan uji tersebut, dilakukan pengujian kelayakan model taksiran sehingga diperoleh sifat BLUE.

Selain menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dengan metode analisis kualitatif, yang akan lebih banyak didasarkan pada model *descriptive analysis*. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengkaji dan menggambarkan permasalahan yang terkait dengan kemiskinan dalam tinjauan Islam berdasarkan studi pustaka.

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang lebih jelas, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data kemiskinan, data pembangunan manusia dan pengeluaran pemerintah di sektor publik (bidang pendidikan dan kesehatan) dari tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005 di 33 provinsi di Indonesia.
2. Analisis data dilakukan dengan bantuan Eviews dan Microsoft Excel dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan data pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Data pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dan kesehatan yaitu terlihat dari sektor 11 dan 13 dalam pengeluaran pembangunan di APBN dijumlah terlebih dahulu. Hasil penjumlahan kedua pengeluaran disebut pengeluaran publik. Selanjutnya pengeluaran sektor publik tersebut perlu dilakukan konversi. Hal ini disebabkan data pengeluaran pemerintah dalam APBN sebelum tahun 2000 masih disajikan menurut tahun anggaran, baru tahun 2000 menjadi tahun kalender.
  - b. Data tahun anggaran dikonversikan menjadi tahun kalender dengan menggunakan rumus sederhana berikut, misalnya untuk tahun 1996 diperoleh dari perhitungan  $(25\% \times \text{pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga kesehatan tahun 1995/96}) + (75\% \times \text{pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga kesehatan tahun 1996/97})$ . Dengan demikian, secara implisit mengasumsikan bahwa pengeluaran untuk satu tahun anggaran terdistribusi merata untuk seluruh bulan (Brata, 2005). Setelah didapat angka pengeluaran pemerintah untuk kedua sektor tersebut kemudian dipersentasikan dengan total pengeluaran. Data Kemiskinan didapat dari persentase angka penduduk miskin terhadap jumlah penduduk. Seperti halnya dengan pengeluaran pemerintah di sektor publik berbentuk persentase maka data kemiskinan

pun berbentuk persentase pula. Sementara itu, data pembangunan manusia didapat dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini merupakan *proxi* dari pembangunan manusia.

- c. Tabulasi data menjadi data panel
- d. Regresi data dengan program *Eviews*
- e. Menentukan model
- f. Regresi data dengan *Eviews* menggunakan metode OLS, Metode Efek Tetap dan Metode Efek Random
- g. Pengujian model dengan Chow Test, Hausman dan LM Test.
- h. Menaksir parameter dan *standar error*-nya dalam model regresi linier
- i. Pemeriksaan model sesuai dengan teori
- j. Mengukur *Goodness of Fit* ( $R^2$ )
- k. Melakukan uji t untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak
- l. Melakukan interpretasi data.
- m. Setelah diperoleh gambaran dari hasil penelitian tersebut maka akan dilakukan kajian terkait kemiskinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Berisi pendahuluan yang akan mengantarkan betapa pentingnya penelitian mengenai ” Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan” serta berisi rencana yang akan dilakukan sehubungan dengan penelitian tersebut. Dengan demikian pada bagian ini akan dibahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta gambaran singkat tentang batasan masalah, kerangka teoritis,

hipotesis dan metode penelitian. Bab I ini diakhiri oleh sistematika penulisan tesis.

Bab II menyajikan Landasan Teori dan Studi Literatur. Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, dalam hal ini teori yang terkait dengan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sektor publik, pembangunan manusia dan kemiskinan berdasarkan tinjauan ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Selanjutnya juga akan diulas mengenai hasil studi terdahulu terkait dengan judul penelitian. Dari hasil studi terdahulu tersebut akan dilakukan perbandingan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian tersebut sehingga dapat diketahui benang merah dari penelitian tersebut. Juga akan dibahas tentang penerapan teori atau konsep dalam pemecahan masalah

BAB III menyajikan metodologi penelitian yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini terdiri dari pengantar, variabel penelitian, data dan sumber data, teknik dan model yang digunakan, dan akan ditutup dengan *flowchart* proses penelitian.

Bab IV menyajikan analisis dan pembahasan. Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan karena berisi tentang hasil-hasil pengujian yang telah dilakukan, yang mana hasil pengujian tersebut akan dibahas satu persatu secara ringkas dan jelas. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dianalisis sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan menjawab pertanyaan penelitian yang didasarkan pada data dan hasil temuan yang ada. Setelah menarik kesimpulan, tibalah pada tahapan membuat rekomendasi (saran) guna menentukan langkah-langkah praktis selanjutnya.